

ABSTRAK

Kebijakan mutasi merupakan instrumen yang penting untuk manajemen pegawai negeri sipil, khususnya dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah pun memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola aparatur daerah, salah satunya dengan melakukan penataan SDM, dalam semangat reformasi birokrasi juga menuntut Pemda dalam manajemen pegawai agar menjunjung tinggi kompetensi, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan gaji yang sepadan.

Namun, kepala daerah sebagai pejabat politik yang dipilih dari kontestasi pemilu, juga mempunyai tuntutan dari pendukungnya untuk dapat memberikan posisi dalam pemerintahan. Sedangkan pendukung lain dari masyarakat pun menuntut pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan pegawai yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi.

Dari situlah peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dilakukannya mutasi di Kabupaten Gresik, dan apakah dalam mutasi tersebut ada pertimbangan lain selain merit system, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berangkat dari rumusan tersebut peneliti mendapatkan data bahwa mutasi yang dilakukan adalah untuk reorganisasi, mengevaluasi pegawai, untuk penyegaran, mengembalikan pada bidangnya, menata pegawai yang pangkatnya lebih rendah dari bawahannya. Namun, diantara pertimbangan tersebut ada pula pertimbangan yang ada kepentingan politik yakni terkait keterkaitannya dengan dukung-mendukung dalam Pemilu.

Kata Kunci : Mutasi, Politisasi Birokrasi, Manajemen Kepegawaian, Dukung-Mendukung Pemilu.